BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu negara didirikan dengan tujuan mewujudkan keadaan masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin serta dapat mencukupi kepentingan-kepentingan masyarakat yang lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara membentuk suatu organisasi yang diserahi tugas untuk mewujudkan tujuannya dan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan negara agar terlaksana dengan baik. Organisasi yang dibentuk dan diberi kas untuk negara tersebut adalah pemerintah.

Pembangunan di Indonesia dewasa ini semakin berkembang dengan pesat. Indonesia sebagai negara yang berkembang, banyak melaksanakan usaha pembangunan di segala bidang. Dalam melancarkan proses pembangunan ini, semua pihak ikut terlibat di dalamnya. Untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pembangunan pemerintah yang baik, pengelolaan anggaran perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab.

Setiap lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah perlu melakukan penyusunan suatu anggaran, karena anggaran merupakan suatu bentuk perencanaan. Anggaran merupakan suatu rencana terinci yang secara menyeluruh atas segala kegiatan dan aktivitas yang akan dilakukan dalam waktu tertentu. Suatu anggaran harus menggambarkan tentang rencana-rencana, sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan, sehingga merupakan alat pengendalian untuk membandingkan apakah hasil yang telah dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak.

Penganggaran merupakan rencana keuangan yang sistematis tentang alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya. Berbagai macam dalam sistem penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna pengendalian keuangan, rencana

manajemen, prioritas dari penggunaan dana dan pertanggungjawaban kepada publik.

Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran adalah sebuah rencana yang sistematis yang meliputi sumber dana dan pengalokasian dana ke seluruh kegiatan atau aktivitas (dalam sebuah proyek) beserta waktu dibutuhkan dana tersebut dalam satuan periode tertentu untuk mencapai tujuan aktivitas secara keseluruhan. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi juga memerlukan suatu anggaran atau perencanaan untuk dapat melaksanakan atau mencapai kinerja yang telah dicanangkan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 125 ayat 1 menjelaskan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) menyusun anggaran kas SKPD. Pasal 126 ayat (1) menjelaskan mengenai Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk menandai pengeluaran-pengeluaran yang sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan. Dalam Pasal 126 ayat (2) menjelaskan mengenai anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna menandai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. Dalam Pasal 126 ayat (3) menjelaskan mengenai mekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah daerah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penyusunan anggaran kas dalam bentuk laporan tugas akhir

yang berjudul **"TINJAUAN ATAS PENYUSUNAN ANGGARAN DAN REALISASI KAS PADA SEKRETARIAT DAERAH (SETDA) PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT"**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, dapat diidentifikasikan pokok-pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana posedur penyusunan anggaran kas pada Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana prosedur penyusunan laporan realisasi kas pada Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, secara garis besar maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi, mengolah dan menjelaskan data dan informasi tentang penyusunan anggaran dan realisasi kas pada Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dapat membantu penulis dalam penyusunan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat pada pendidikan Program Diploma III, Program Studi Akuntansi pada Universitas Widyatama Bandung.

Adapun tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah :

1. Mengetahui prosedur penyusunan anggaran kas pada Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2. Mengetahui prosedur penyusunan laporan realisasi kas pada Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari Laporan Tugas Akhir yang didukung oleh informasi yang diperoleh penulis, maka dengan penelitian ini penulis mengharapkan hasilnya dapat bermanfaat, yaitu :

1. Bagi Penulis

   Menambah wawasan bagi penulis mengenai penyusunan anggaran kas yang dilakukan oleh Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan membandingkan pengetahuan dan teori yang diperoleh dari perkuliahan dengan kondisi nyata di lapangan serta sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sidang Diploma III Program Studi Akuntansi Universitas Widyatama.

2. Bagi Setda

   Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi kegiatan Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam pengelolaan kas sehingga menghasilkan anggaran kas yang sesuai dengan perencanaan.

3. Bagi Kalangan Akademis

   Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan berguna untuk bahan penelitian lebih lanjut, sebagai referensi bagi penelitian yang mengambil topik tentang anggaran khususnya anggaran kas.

1.5 Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan serta menganalisa data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai masalah yang dihadapi, kemudian ditarik kesimpulan. Penulis melakukan tinjauan penelitian pada Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan mengumpulkan data yang akan digunakan dengan cara :

1. Penelitian Lapangan *(Field Research)*

   Pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung pada Instansi Pemerintah, dengan cara :

   a. Wawancara *(Interview)*, yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang dianggap penting pada Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan penyusunan laporan tugas akhir ini.

b. Observasi, yaitu mengadakan kegiatan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk lebih memahami kondisi Instansi Pemerintah.
c. Kerja Praktik di Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

2. Studi Kepustakaan *(Library Research)*, yaitu mencari referensi dan teori-teori yang relevan serta dijadikan sebagai dasar kriteria dalam membahas masalah yang akan ditemukan pada saat penelitian lapangan.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini, penulis mendapatkan data yang dibutuhkan dengan melakukan penelitian pada Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Jalan Diponegoro No. 22 Bandung. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2010 sampai dengan selesai.